



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnrjati.ac.id

AL-AMWAL

Determinan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sodik Dwi Purnomo
Politeknik Indonesia Madiun
Email: sodikdwipurnomo@yahoo.com

Abstrak

Persentase kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode 2000-2017 selalu mengalami penurunan namun ditahun yang sama persentase kemiskinannya selalu lebih tinggi dari kemiskinan Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan model *Ordinary Least Square* (OLS) dan data yang digunakan yaitu data sekunder atau data times series. Dalam mengolah data, penulis menggunakan bantuan *software Eviews 8*. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2017.

Kata Kunci: Kemiskinan, Inflasi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

The percentage of poverty in the Special Province of Yogyakarta from periode 2000-2017 always decreases but in the same year the percentage of poverty is always higher than the national poverty. This study aims to analyze the influence of the level of education, infrastructure, and economic growth on poverty in the Special Province of Yogyakarta in 2000-2017. The analytical method used is multiple linear regression with the Ordinary Least Square (OLS) model approach and the data used is secondary data or times series data. In processing data, the author uses the help of software Eviews 8. Based on the results of analysis and testing of hypotheses, the results show that the level of education, infrastructure, and economic growth variables have a negative and significant effect on poverty in Yogyakarta Special Region 2000-2017

Keywords: Poverty, Inflation, Education, Infrastructure, and Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi masalah besarnya kemiskinan. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010).

Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat artinya kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang rendah terjadi karena investasi per kapita yang juga rendah. Tingkat investasi per kapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik per kapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan. Sebagai sebuah hubungan sebab akibat (Nurkse dalam Kuncoro, 2010).

Menurut Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 633,2 ribu orang menjadi 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen Indonesia atau sekitar 31,02 juta jiwa. Hal ini dikarenakan, meningkatnya jumlah bantuan sosial tunai pemerintah sebesar 87,6 persen selama triwulan pertama 2018. Hal ini berkontribusi pada naiknya kemampuan belanja rumah tangga masyarakat miskin sebesar 3,06 persen selama periode September 2017 sampai dengan Maret 2018. Selain itu program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan pertama telah tersalurkan sesuai jadwal (BPS, 2018).

Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah pusat sampai saat ini memang telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pendidikan dasar, memenuhi kebutuhan dasar, seperti akses terhadap air bersih, listrik, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Namun kebijakan tersebut belum secara komprehensif mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan menyeluruh terutama dari sisi ekonomi (Saragih, 2015).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, menargetkan kemiskinan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 8,0 sampai dengan 7,0 persen dari total penduduk Indonesia (TNP2K, 2018). Berikut ini Tabel 1 yang menunjukkan proyeksi angka kemiskinan yang tertuang pada RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 1. Proyeksi Kemiskinan dan Angka Terealisasi di Indonesia 2015-2019
(dalam persen)**

Tahun	Proyeksi Kemiskinan	Terealisasi
2015	9,5-10,5	11,76
2016	9,0-10,0	10,78
2017	8,5-9,50	10,12
2018	7,5-8,80	9,82*
2019	7,0-8,0	-

Sumber: RPJMN, 2015-2019

*) Angka semester 1 tahun 2018

Tabel 1 menunjukkan proyeksi kemiskinan dan terealisasi di Indonesia. Selama tahun 2015 sampai dengan 2018 proyeksi kemiskinan tidak pernah tercapai. Walaupun proyeksi kemiskinan tidak tercapai, tetapi persentase kemiskinan selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan program dan kebijakan yang cukup strategis. Namun kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada faktanya masih banyak daerah di Indonesia yang kemiskinannya lebih tinggi dari nasional. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan guna mengurangi kemiskinan, baik nasional maupun daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Berikut Tabel 2 yang menunjukkan perbandingan persentase kemiskinan DIY dan Indonesia.

Tabel 2. Persentase Kemiskinan Indonesia dan DIY 2008 – 2018
(dalam persen)

Tahun	Indonesia	DIY
2008	15,42	18,32
2009	14,15	17,23
2010	13,33	16,83
2011	12,49	16,08
2012	11,80	15,96
2013	11,42	15,23
2014	11,11	14,77
2015	11,76	14,03
2016	10,78	13,25
2017	10,12	12,69

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

Tabel 2 menunjukan persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi DIY. Tahun 2018 sampai dengan 2017 persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun walaupun di DIY mengalami penurunan tapi persentase kemiskinannya lebih besar daripada Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan data penerima manfaat, sehingga orang yang berhak menerima bantuan malah tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, masalah paling signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY adalah tingginya angka *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* berarti warga yang masuk dalam kategori mampu, tetapi warga terdaftar mendapat bantuan, sedangkan *exclusion error*, sebaliknya, yaitu warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan.

Kebijakan pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi kemiskinan sudah melalui koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah pusat. Beberapa program yang digalakkan pemerintah pusat dan DIY yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Beras Sejahtera, bantuan hunian sederhana dengan nama Rumah

Tidak Layak Huni (Rutilahu). Selain itu juga ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang juga diterapkan di seluruh Indonesia (Kementerian Sosial, 2016).

Dengan adanya perencanaan strategi atau program yang baik yang dapat diterapkan dengan efektif, sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan dalam jangka panjang yang perlu didasari dengan data pendukung yang akurat. Dengan demikian yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadi penurunan persentase kemiskinan di Provinsi DIY dan persentase kemiskinan selalu lebih tinggi dari kemiskinan Nasional, sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

Kemiskinan di DIY diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan sangat menentukan jenis pekerjaan yang diterima oleh seseorang. Apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Menurut Menurut Tarabini & Jacovkis (2012), Zhang (2014), dan Purnomo (2018) pendidikan sebagai indikator pertama dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin besar peluang dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk mempermudah mobilitas orang, barang, dan jasa dengan demikian roda perekonomian semakin cepat dan diharapkan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Menurut Perkins, Fedderke, & Luis (2005) dan Seetana, Ramessur, & Rojid (2009) pembangunan infrastruktur dibutuhkan oleh setiap negara guna menopang dunia usaha, sehingga peningkatan infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam temuan Paramita & Purbadharmaja (2015), Ramdani (2015), Datt, Ravallion, & Murgai (2016), dan Moore & Donaldson (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan 2) menguji pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan, dan 3) menguji apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY tahun 2000- 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan Perspektif Islam

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi masyarakat miskin yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin (Wargadinata, 2011).

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*. Definisi *faqîr*, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya. Kata *miskîn* jika dilihat dari makna aslinya yang berarti 'diam', maka kata *miskîn* dapat ditarik arti secara

istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79.

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. al-Kahfi: 79)”

Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur'an maupun hadis dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya (Abdullah, 2008).

Pendidikan

Teori modal manusia (*Human Capital Theory*) terdiri dari dua suku kata yang memiliki arti yang berbeda yaitu manusia dan modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Dengan demikian, manusia dalam konteks *human capital* adalah sebagai pelaku atau sebagai bentuk modal seperti hanya mesin atau teknologi. Manusia juga berperan penting dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Teori modal manusia didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses aktivitas pendidikan, pelatihan, maupun kursus (Au, Altman, & Roussel, 2008). Dengan demikian, *human capital* sesuatu yang diperoleh melalui proses pembelajaran atau akumulasi yang melalui tahapan tertentu.

Infrastruktur

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Posumah, 2015). Menurut Lewis dalam Posumah (2015) prasarana (*Infrastructure*) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem.

Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dapat dibagi menjadi menjadi dua, pertama Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (listrik, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang). Kedua, infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial meliputi infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan

Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan sebagai acuan adalah *exogenous growth* model atau *Solow growth model*. Model Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual. Model Solow merupakan pengembangan dari model pertumbuhan Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Tenaga kerja dan modal diasumsikan mengalami *diminishing returns* jika keduanya dianalisis secara terpisah dan constant returns to scale apabila keduanya dianalisis secara bersama-sama (Todaro dan Smith, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data *times series* atau runtun waktu. Bentuk analisis yang menggunakan data sekunder dari tahun 2003 sampai dengan 2012 yang bersumber dari BPS, padan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY, serta sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya. Variabel dependen penelitian ini adalah kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang diproksi dari tenaga kerja yang berkerja yang berpendidikan SMA ke atas dan diukur berdasarkan satuan jiwa. Variabel infrastruktur diukur dengan satuan kilometer dan diproksi berdasarkan panjang jalan baik itu panjang jalan kota/kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu pertumbuhan ekonomi diukur dengan ukuran persentase.

Model penelitian menggunakan pendekatan regresi dengan metode *Ordinary Least Square*. Dalam pembahasan mencakup estimasi hubungan beberapa faktor terhadap kemiskinan di DIY seperti, tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu determinan kemiskinan kemiskinan di DIY, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kemsikinan

X₁ : Tingkat pendidikan

X₂ : Infrastruktur

X₃ : Pertumbuhan ekonomi

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan dalam suatu penelitian dengan tujuan penaksiran dan pengujian hipotesis. Untuk itu digunakan uji histogram *normality test*. Bila hasil uji ini

menunjukkan nilai *probability* lebih besar dari tingkatan signifikan yang digunakan (0,05) maka distribusi data menyebar dengan normal dan sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan dan mengetahui ada tidaknya hubungan dua atau lebih variabel yang saling berkaitan dalam suatu model. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan deteksi klien. Deteksi klien dilakukan dengan melakukan regresi suatu variabel independen dengan variabel independen lain. *Rule of thumb* dengan membandingkan nilai R^2 model dengan nilai $R^2_{Auxiliary}$. Bila nilai R^2 regresi *Auxiliary* lebih besar nilai R^2 model, maka model mengandung gejala multikolinearitas. Bila nilai R^2 regresi *Auxiliary* lebih kecil nilai R^2 model, maka model tidak mengandung gejala.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan (Algifari, 2000). Untuk menguji tidak adanya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan melakukan uji gleser. Untuk menerima asumsi klasik bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, nilai probabilitasnya harus lebih besar dari alfa ($\alpha=5\%$) (Gujarati, 2000).

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dalam sebuah model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi maka dibutuhkan sebuah metode pengujian Breusch-Godfrey Metode ini berdasarkan pada nilai F dan $Obs \cdot R\text{-squared}$, dimana jika nilai probabilitas dari $Obs \cdot R\text{-squared}$ melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya tidak ada masalah autokorelasi (Gujarati, 2000).

2. Pengujian Secara Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi yang disesuaikan R^2 adj

Menurut Gujarati (2000) koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. R^2 merupakan besaran non negatif dengan batas yaitu $0 < R^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi semakin tinggi atau mendekati angka 1 (satu), maka semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependennya.

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Gujarati (2000) uji F secara bersama-sama atau simultan digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya maka model persamaan regresi dapat dikatakan cocok atau *fit*.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial terhadap variabel dependennya. Suatu variabel akan memiliki pengaruh signifikan jika nilai t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linier Berganda

Berdasarkan ringkasan hasil regresi linier berganda:

Tabel 3. Ringkasan Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	T-hitung	Prob.
C	12,3628	-12,9649	0,0000
X ₁	-10,9038	26,9425	0,0000
X ₂	-0,9164	6,9927	0,0009
X ₃	-0,7382	5,9352	0,0001
Nilai T-tabel			1,662
Nilai F-hitung			224,863
Nilai F-tabel			0,337
R ² -squared			0,9575

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dirumuskan persamaan penelitian sebagai berikut.

$$Y=12,362-0,903X_1-10,916X_2-0,738X_3$$

Nilai konstanta sebesar 12,362 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka variabel dependen adalah 12,362.

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar -10,903 artinya variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini artinya apabila tingkat pendidikan bertambah satu persen maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar 10,903 persen.

Nilai koefisien regresi infrastruktur sebesar -0,916 artinya infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini artinya apabila infrastruktur bertambah satu kilometer maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,916 persen.

Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,738 artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini artinya apabila pertumbuhan ekonomi bertambah satu persen maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,738 persen.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dilakukan analisis histogram *normality test* hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *probability* sebesar 0,592 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai alphanya ($\alpha=0,05$), sehingga distribusi data variable penelitian adalah normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variable tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai *Auxiliary* \leq nilai R² model. Jadi dapat diartikan bahwa hasil uji klien di atas tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini Tabel 4 yang menunjukkan nilai R² *Auxiliary* dan nilai R² model.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Regresi <i>Auxiliary</i>	Nilai <i>Auxiliary</i>	R ² Model
X1	0.43	0,95
X2	0.54	0,95
X3	0.63	0,95

Sumber : Data diolah, 2018

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* sebesar 0,217. Berdasarkan kriteria bahwa nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) maka uji di atas tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dengan menggunakan *Breusch-godfrey test* (BG). Dan berdasar uji (BG) dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas *chi-square* (2) menunjukkan nilai 0,3535. Berdasarkan kriteria nilai 0,3535 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar ($\alpha=0,05$) maka uji di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.

Pengujian secara Statistik

a. Uji *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi)

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien R^2 sebesar 0,95 nilai tersebut mendekati nilai 1, dengan demikian tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variable independen mampu menjelaskan presentase sebesar 95 persen, sedangkan sisanya 5 persen perubahan besarnya kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil estimasi model persamaan regresi maka diperoleh F-hitung sebesar 224,863 sedangkan nilai F-tabel sebesar 1,662 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F-tabel ($224,863 > 1,662$), artinya H_0 ditolak. Kesimpulan hipotesis yang menyatakan variable tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY diterima.

c. Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α)=0,05 diketahui nilai t_{hitung} sebesar 0,337. Dari nilai t_{tabel} maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen sebagai berikut:

Nilai t_{hitung} variable tingkat pendidikan sebesar 26,942 dan nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 0,337. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak berarti hipotesis yang menyatakan variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di DIY dapat diterima.

Nilai t_{hitung} variabel infrastruktur sebesar 6,992 dan nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 0,337. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak, berarti hipotesis yang menyatakan variabel infrastruktur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di DIY dapat diterima.

Nilai t_{hitung} variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,935 dan nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 0,337. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak, berarti hipotesis yang menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di DIY dapat diterima.

Pembahasan

a. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan

Variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY. Hal ini sesuai dengan temuan Tarabini & Jacovkis (2012), Zhang

(2014), dan Purnomo (2018) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dari masyarakat maka akan semakin besar peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Temuan tersebut selaras dengan pernyataan Arsyad (2010) yaitu salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Apabila nilai tingkat pendidikan meningkat maka kualitas dan kemampuan sumber daya manusia juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan produktivitas masyarakat akan meningkat. Dengan peningkatan produktivitas maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kemiskinan akan berkurang. Proksi dari pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang berkerja. Dengan demikian semakin banyak tenaga kerja yang berpendidikan SMA ke atas maka semakin menurunkan kemiskinan. Menurut Permana (2012) bahwa pendidikan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan mengentaskan kemiskinan baik kemiskinan di pedesaan maupun kemiskinan dipertanian.

b. Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan

Variabel infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY. Temuan ini sejalan dengan Menurut Perkins, Fedderke, & Luis (2005) dan Seetanah, Ramessur, & Rojid (2009) pembangunan infrastruktur dibutuhkan oleh setiap negara guna menopang dunia usaha, sehingga peningkatan infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan infrastruktur akan mempermudah dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa sehingga akan berdampak pada percepatan perekonomian dengan hal tersebut dapat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterakan. Dengan demikian masyarakat miskin akan berkurang dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

c. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variabel pertumbuhan ekonomi negatif signifikan terhadap kemiskinan di DIY. Hal ini sesuai dengan temuan Susanti (2013) dan Paramita & Purbadharmaja (2015), Ramdani (2015), dan Moore & Donaldson (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan kemiskinan. Menurut Datt, Ravallion, & Murgai (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan penurunan angka ketimpangan demikian akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2000-2017. Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi DIY harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif artinya dampak dari pertumbuhan dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat. Selain itu, variabel pendidikan dan infrastruktur juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dengan demikian pemerataan pendidikan dan infrastruktur harus dibangun secara merata dan menyeluruh, sehingga angka kemiskinan di Provinsi DIY dapat berkurang yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abi (2008). Tafsir al-Qurtubi, Jilid VIII, terjemahan:. Budi Rosyadi. Jakarta: Pustaka Azzam
- Algifari. (2000). *Analisis Regresi, Teori, Kasudan Teori*. Yogyakarta. BPFE.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Penerbit STIE YKPN
- Au, A. K. M., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee Training Needs And Perceived Value of Training in The Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach. *Journal of European Industrial Training*,32 (1): 19-31
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat , 2018. *Statistik Indonesia Tahun 2018*. . Jakarta. Pusat Badan Pusat Statistik.
- Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2016). Growth, Urbanization And Poverty Reduction In India. *Nber Working Paper No. 21983*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Grigg, N. (1988). Infrastructure Engineering and Management. *John Wiley & Sons Australia, Limited*.
- Gujarati, Damodar. (2000). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Kementerian Sosial. (2016). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. Jakarta. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Moore, J. D., & Donaldson, J. A. (2016). Human-Scale Economics: Economic Growth and Poverty Reduction in Northeastern Thailand. *World Development*. 85: 1-15
- Paramita, A. A. I. D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4(10): 1194-1218
- Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal Of Economics (Online)*. 1 (1): 17 – 31
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*. 15(3): 1-13
- Purnomo, S, D. (2018). Determinants of Income of Poor Women-Headed Households in Madiun City. *Eko-Regional*. 13(2):19-31
- Ramdani, M. (2015). Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*. 4(1): 58-64
- Saragih, Juli P. (2015). Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 6 (1): 45 – 59
- Susanti, Sussy. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. 9 (1): 1 – 18
- Tarabini, A., & Jacovkis, J. (2012). The Poverty Reduction Strategy Papers: An Analysis of a Hegemonic Link Between Education and Poverty. *International Journal Of Educational Development*. 32(4): 507-516

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). *Penganggulangan kemiskinan: situasi terkini, target pemerintah, dan program percepatan*. Jakarta.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. 2011. *Economic Development*. Eleventh Edition. United States: Addison Wesley.
- Wargadinata, Wildana. (2011). *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zhang, H. (2014). The Poverty Trap Of Education: Education-Poverty Connections in Western China. *International Journal Of Educational Development*. 38: 47-58